

Muhammadiyah Hargai Sikap PDIP, Hanura, Gerindra dan PKS

Minggu, 01-04-2012

Jakarta – Proses siding paripurna DPR kemarin sangat mengecewakan. Beberapa partai politik bermain-main dengan aspirasi rakyat. Sudah sangat jelas bahwa survey menunjukkan sekitar 90% rakyat menolak kenaikan harga BBM, karena jelas akan disertai dengan kenaikan ongkos transportasi dan harga-harga sembako.

Begitu pula protes mahasiswa dan buruh yang begitu massif seharusnya ditangkap oleh partai-partai politik sebagai aspirasi rakyat. Sayangnya sebagian partai politik tidak menangkapnya, justru mempertimbangkan kepentingan koalisi yang sesat.

Muhammadiyah sangat menghargai partai-partai politik lain seperti PDIP, Hanura, Gerindra dan PKS, yang memilih menolak kenaikan harga BBM. Muhammadiyah berpendapat menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar bebas itu jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 28 ayat 2 UU Migas.

Hal ini bagi Muhammadiyah merupakan persoalan mendasar, yang seyogyanya semua parpol harus berkomitmen kepada penegakan konstitusi dan kedaulatan Negara dalam bidang ekonomi.

Hal ini pula sesungguhnya yang mendorong Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah beberapa hari lalu bersama sejumlah Ormas di Jakarta mengajukan judicial review terhadap UU Migas, karena UU itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD tahun 1945.

Reporter : Edy Kuscahyanto

Red. : Roni Tabroni